

**TINJAUAN PENYELESAIAN PIUTANG PNBP DENGAN
KLASIFIKASI PENYISIHAN MACET PADA LAPORAN
KEUANGAN LINGKUP BIRO KEUANGAN DI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN.**

Oleh Rezi Nur Annisa

ABSTRAK

Piutang negara terjadi ketika kredit diberikan kepada debitur dan dilunasi dengan mengangsur atau cicilan pada saat jatuh tempo. Selain itu, setiap debitur, baik individu maupun badan hukum, wajib membayar piutang negara, yang merupakan hak pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor PNBP. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang karena peraturan. Piutang macet terjadi karena tidak ada pelunasan hingga tagihan ketiga. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini termasuk melakukan penelusuran di pustaka, mencari berbagai sumber yang relevan, melakukan pencarian melalui internet, dan mempelajari apa yang terjadi selama praktik kerja lapangan di KLHK. Sejumlah data serta informasi yang dikumpulkan diproses, kemudian melalui penggunaan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses penyelesaian piutang PNBP dengan klasifikasi penyisihan macet di lingkup biro keuangan KLHK terdapat 6 tahapan. Penyelesaian tersebut dimulai dari Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara, Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), PPNTO, Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak, Pelaporan Piutang Negara.

Kata kunci : Piutang Negara, Piutang PNBP, Piutang Macet, Penyelesaian.

**REVIEW THE SETTLEMENT OF PNBP RECEIVABLES
WITH A BAD DEBT ALLOWANCE CLASSIFICATION IN
THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE SCOPE OF THE
FINANCE BUREAU AT THE MINISTRY OF
ENVIRONMENT LIFE AND FORESTRY.**

By Rezi Nur Annisa

ABSTRACT

State receivables occur when credit is given to debtors and repaid in installments or installments at maturity. In addition, every debtor, both individuals and legal entities, is obliged to pay state receivables, which are the government's rights, to increase state revenue in the PNBP sector. PNBP receivables are the amount of money that must be paid to the government and/or the government's rights that can be valued in money due to regulations. Bad debts occur because there is no repayment until the third bill. The methods used to collect data and information for this research include conducting library searches, searching for various relevant sources, conducting internet searches, and studying what happened during field work practices at KLHK. A number of data and information collected are processed, then through the use of qualitative descriptive analysis techniques. The process of resolving PNBP receivables with the classification of bad allowance within the scope of the KLHK finance bureau there are 6 stages. The settlement starts from Recognition and Measurement of State Receivables, Handover of State Receivables Management originating from Non-Tax State Revenue, Temporary Uncollectible Receivables (PSBDT), PPNTO, Elimination of State Receivables Conditionally and Absolute Elimination of State Receivables, Reporting of State Receivables.

Keywords: State Receivables, PNBP Receivables, Bad Debts, Settlement.